

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan demokratis, lembaga legislatif memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai representasi rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah menjadi lembaga yang membuat aturan setiap daerah, merealisasikan aspirasi masyarakat serta memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan publik. Namun, di tengah dinamika politik dan kemajuan teknologi informasi saat ini, citra lembaga legislatif, termasuk DPRD, sering kali menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan kepercayaan publik.

Beberapa survei nasional termasuk yang dilakukan oleh survei indikator politik Indonesia, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, khususnya DPR, cenderung berada pada posisi rendah dan mengalami fluktuasi pada periode tertentu. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa hanya sekitar 7% responden yang menyatakan “sangat percaya” terhadap DPR, sementara sebagian besar lainnya berada pada kategori “cukup percaya” atau “kurang percaya” (Indikator Politik Indonesia, 2024). Temuan serupa juga dilaporkan oleh media arus utama, di mana DPR dan partai politik secara konsisten berada pada peringkat bawah dalam indeks kepercayaan publik (Kompas, 2023; ANTARA News, 2023).

Menurun atau rendahnya kepercayaan publik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa isu korupsi, rendahnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas anggota dewan menjadi penyebab dominan. Indonesian Parliamentary Center menyoroti rendahnya kepatuhan anggota legislatif dalam pelaporan LHKPN, yang berdampak pada persepsi integritas dan penurunan kepercayaan masyarakat (Indonesian Parliamentary Center, 2022). Laporan resmi DPR juga mencatat adanya persoalan seperti tingginya tingkat ketidakhadiran, konflik kepentingan, serta kasus-kasus korupsi yang memperburuk citra parlemen (DPR RI, 2017).

Selain faktor internal, pemberitaan negatif di media massa turut membentuk persepsi publik terhadap lembaga legislatif. Sentimen media yang menonjolkan isu kontroversial atau dugaan pelanggaran etik oleh anggota dewan cenderung memperkuat citra negatif lembaga legislatif di mata masyarakat (Kompas, 2023). Kondisi tersebut semakin diperparah oleh lemahnya komunikasi publik yang dilakukan oleh sebagian anggota dewan, terutama dalam menyampaikan kinerja dan capaian secara transparan kepada masyarakat (McCombs, 2014). Situasi ini menunjukkan bahwa framing media dan minimnya komunikasi publik dapat berdampak signifikan terhadap pembentukan citra lembaga legislatif.

Dalam konteks DPRD Provinsi Jawa Barat, tantangan tersebut juga dihadapi oleh berbagai partai politik yang memiliki perwakilan di lembaga legislatif daerah, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik dengan jumlah massa yang banyak di Provinsi Jawa Barat dan memiliki peran signifikan dalam dinamika politik daerah. PKS dikenal

sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Sesuai dengan Visi dari partai PKS yaitu, “Menjadi Partai Islam rahmatan lil 'aalamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” partai ini berupaya menunjukkan komitmennya terhadap aspirasi rakyat melalui berbagai kegiatan legislasi, pengawasan, dan kebijakan daerah (Partai Keadilan Sejahtera, 2023). Namun, di tengah persaingan politik yang ketat dan derasnya arus informasi, menjaga citra positif anggota dewan fraksi menjadi tantangan tersendiri baik dari anggota dewan fraksi PKS maupun Humas Fraksi PKS.

Citra adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan, yang kemudian menjadi dasar perbandingan. Definisi lain dari citra adalah sebagai reputasi dan prestasi yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan (Frank Jefkins, 2017). Citra politik anggota dewan pada masa kini sangat mudah dipengaruhi oleh pemberitaan media massa maupun opini publik yang berkembang melalui media sosial. Dalam konteks digitalisasi informasi, setiap tindakan, pernyataan, keputusan politik, atau kebijakan anggota dewan dapat dengan cepat menjadi sorotan publik dan memicu reaksi berantai di ruang digital.

Fenomena ini terlihat dalam dinamika DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki pengawasan tinggi, berbagai kegiatan legislasi, pengawasan, dan pembahasan anggaran anggota DPRD sering menjadi sorotan media dan publik. Misalnya, Fraksi PKS DPRD Jabar pernah meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan vaksinasi COVID-

19 dalam rapat paripurna (ANTARA News, 2023). Walaupun langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan, sebagian media memframing isu tersebut secara berbeda sehingga berpotensi membentuk persepsi negatif. Potongan video rapat yang tersebar di media sosial juga memunculkan interpretasi beragam, mulai dari dukungan terhadap sikap kritis fraksi hingga tuduhan politisasi isu (Suara Indonesia, 2023).

Situasi serupa juga terlihat saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Publik cenderung melihat DPRD sebagai satu kesatuan aktor politik, sehingga ketika muncul perdebatan mengenai alokasi anggaran tertentu, seluruh anggota dewan, termasuk Fraksi PKS, seringkali menerima dampak persepsi negatif, meskipun sikap politik fraksi berbeda dari keputusan akhir. Minimnya akses publik terhadap proses internal DPRD menyebabkan informasi yang diterima masyarakat seringkali tidak utuh, sehingga peran komunikasi publik menjadi sangat penting (DPRD Jabar, 2024).

Selain itu, kegiatan reses anggota dewan juga rentan terhadap persepsi publik yang beragam. Dokumentasi kegiatan reses yang diunggah ke media sosial dapat ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Unggahan formal dapat dianggap seremonial, sementara dokumentasi pemberian bantuan sosial dapat menimbulkan tuduhan pencitraan. Bahkan ketika anggota fraksi menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah, media tertentu dapat membuat kritik tersebut sebagai pencarian sensasi. Dalam konteks ini, Humas Fraksi PKS memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat, menjaga konsistensi narasi politik, dan

memastikan pesan publik diterima secara proporsional dan menghindari adanya kesalahpahaman (PKS.id, 2023).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, peran humas menjadi sangat penting. Menurut Howard Bonham, Humas adalah seni yang bertujuan untuk membangun sebuah pengertian publik agar menjadi lebih baik dengan harapan agar rasa percaya publik atau pemberdayaan terhadap sebuah lembaga atau organisasi lebih tinggi. Fungsi humas adalah membangun dan memelihara hubungan harmonis antara organisasi dan publiknya dengan cara memfasilitasi komunikasi dua arah, menciptakan citra positif, dan membantu mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi ini mencakup penyampaian informasi, persuasi, identifikasi opini publik, serta tindakan proaktif (konstruktif) dan reaktif (korektif) terhadap masalah.

Dalam hal ini humas fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat berfungsi sebagai pengelola komunikasi antara fraksi dan masyarakat, baik dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan kinerja fraksi, maupun dalam membangun opini publik yang positif terhadap para anggotanya. Selain itu, humas fraksi juga bertugas membangun opini publik yang positif agar citra fraksi tetap terjaga di mata masyarakat. Peran ini mencakup kemampuan untuk mengelola isu yang muncul dalam dinamika politik maupun aktivitas para anggota dewan. Dan di sisi lain, humas juga menangani komunikasi krisis yang berpotensi merusak citra lembaga ataupun individu di dalamnya, sehingga stabilitas reputasi fraksi tetap dapat terpelihara.

Dalam perspektif Teori Public Relations Cutlip, Center, dan Broom, strategi komunikasi humas dipahami sebagai bagian dari fungsi manajemen strategis yang dijalankan secara sistematis untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Dalam konteks penelitian ini, Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat berperan sebagai pengelola komunikasi kelembagaan dan politik yang bertanggung jawab dalam menjaga citra positif anggota dewan di mata publik. Strategi komunikasi humas tidak hanya difokuskan pada penyampaian informasi mengenai aktivitas legislasi dan pengabdian masyarakat, tetapi juga diarahkan pada pengelolaan persepsi publik melalui pesan yang terencana, konsisten, dan sesuai dengan nilai serta tujuan Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat.

Menurut kerangka teori Cutlip, Center, dan Broom, strategi komunikasi Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dijalankan melalui empat tahapan utama. Tahap pertama, *defining the problem*, merupakan proses identifikasi dan analisis masalah komunikasi, isu, serta opini publik yang memengaruhi citra anggota dewan. Tahap kedua, *planning and programming*, adalah penyusunan rencana dan strategi komunikasi, termasuk penentuan tujuan, sasaran publik, pesan, serta media yang digunakan agar tujuan humas tercapai secara efektif.

Tahap ketiga, *taking action and communicating*, meliputi pelaksanaan program komunikasi dan kegiatan humas secara terencana serta konsisten untuk membangun komunikasi dua arah dengan publik. Dan tahap keempat, *evaluating the program*, merupakan proses penilaian terhadap efektivitas strategi komunikasi,

mencakup pengukuran respons publik dan keberhasilan program, serta menjadi dasar penyempurnaan strategi humas berikutnya (Cutlip, Center, & Broom, 2006).

Strategi komunikasi humas merupakan langkah terencana yang mencakup proses analisis situasi, penentuan sasaran komunikasi, pemilihan media yang efektif, penyusunan pesan yang tepat, serta evaluasi atas hasil yang dicapai. Pada Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, strategi komunikasi humas tidak hanya diarahkan untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk membangun narasi positif yang selaras dengan nilai-nilai partai seperti keadilan, profesionalitas, religiusitas, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Strategi komunikasi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, diantaranya, Strategi komunikasi media, dengan menjalin hubungan baik dengan media massa agar pemberitaan tentang kegiatan fraksi bersifat positif dan berimbang. Strategi komunikasi publik, melalui penyelenggaraan kegiatan seperti sosialisasi, reses, seminar, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Strategi komunikasi digital, dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana interaksi langsung antara anggota fraksi dan masyarakat untuk membangun engagement dan citra positif. Strategi komunikasi internal, untuk memperkuat koordinasi antaranggota fraksi agar pesan politik yang disampaikan ke publik memiliki keseragaman dan konsistensi. Terakhir, Strategi manajemen krisis komunikasi, untuk menangani isu-isu yang berpotensi merusak nama baik anggota fraksi atau partai.

Melalui berbagai strategi tersebut, Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu menjadi jembatan antara fraksi dengan publik, serta mampu membangun hubungan yang saling percaya dan bermanfaat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan strategi komunikasi ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman anggota dewan terhadap pentingnya komunikasi publik, dinamika politik yang kompleks, serta pesatnya perkembangan media digital yang sulit dikendalikan.

Selain itu, media massa terkadang melakukan framing berita yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap para anggota dewan. Di sisi lain, media sosial juga menjadi pedang bermata dua yang dapat menjadi alat efektif untuk membangun citra, tetapi juga dapat menjadi sumber penyebaran informasi negatif atau hoaks yang merugikan reputasi fraksi dan partai. Dalam kondisi seperti ini, humas harus memiliki strategi komunikasi yang adaptif, inovatif, dan berbasis data agar mampu merespons dinamika opini publik secara cepat dan tepat.

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji secara mendalam strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjaga citra positif anggota dewan dengan merujuk pada Teori Public Relations Cutlip, Center, dan Broom. Penelitian ini difokuskan pada proses pengelolaan komunikasi humas yang meliputi tahap pendefinisian masalah (*defining the problem*), perencanaan strategi komunikasi (*planning and programming*), pelaksanaan komunikasi (*taking action and communicating*), serta evaluasi program (*evaluating the program*). Melalui keempat tahapan tersebut,

penelitian ini berupaya memahami bagaimana humas merancang dan menjalankan strategi komunikasi secara sistematis dalam merespons isu publik dan membangun hubungan dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi komunikasi humas serta menelaah kemampuan humas dalam menyesuaikan strategi komunikasinya terhadap perkembangan media dan perubahan perilaku komunikasi masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjaga citra positif para anggota dewan fraksi. Penelitian ini memusatkan kajian pada strategi komunikasi humas sebagai elemen fungsi manajemen strategis yang bertujuan membangun dan memelihara hubungan mutualistik antara organisasi (anggota dewan) dan publiknya. Dalam ranah lembaga legislatif daerah, humas memainkan peran krusial dalam pengelolaan komunikasi kelembagaan dan politik, guna membentuk persepsi publik yang positif terhadap kinerja serta integritas anggota dewan..

Menurut Teori Public Relations Cutlip, Center, dan Broom penelitian ini memfokuskan pada proses strategi komunikasi humas. Proses tersebut meliputi empat tahapan utama, yaitu *defining the problem, planning and programming, taking action and communicating*, serta *evaluating the program*. Fokus diarahkan

pada bagaimana Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi isu dan opini publik yang memengaruhi citra anggota dewan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada perencanaan strategi komunikasi yang disusun berdasarkan hasil analisis tersebut.

Fokus penelitian selanjutnya mencakup pelaksanaan dan evaluasi strategi komunikasi humas dalam menjaga citra positif anggota dewan Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini memperhatikan bentuk-bentuk aktivitas komunikasi yang dilakukan serta konsistensi pesan yang disampaikan kepada publik. Evaluasi strategi komunikasi menjadi bagian penting untuk menilai efektivitas program humas yang dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan strategi komunikasi humas secara sistematis sesuai dengan kerangka teori Cutlip.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan mengenai fokus penelitian di atas, peneliti memperoleh sejumlah gambaran umum terkait rumusan pertanyaan penelitian yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:..

1. Bagaimana Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat mengidentifikasi permasalahan komunikasi yang berkaitan dengan citra positif anggota dewan Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat (*defining the problem*)?
2. Bagaimana perencanaan dan pemrograman strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjaga citra positif anggota dewan Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat (*planning and programming*)?

3. Bagaimana pelaksanaan strategi komunikasi Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjaga citra positif anggota dewan Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat (*taking action and communicating*)?
4. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap strategi komunikasi yang telah dijalankan dalam menjaga citra positif anggota dewan Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat (*evaluating the program*)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini guna menjawab semua pertanyaan yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang permasalahan yang perlu digambarkan secara umum. Sehingga fokus penelitian yang sudah dijelaskan di atas memiliki beberapa tujuan penelitian yang dapat dirinci sebagai berikut ini

1. Untuk mengetahui bagaimana Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat mendefinisikan dan mengidentifikasi permasalahan komunikasi yang berkaitan dengan citra positif anggota dewan Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk memahami proses perencanaan dan pemrograman strategi komunikasi Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjaga citra positif anggota dewan Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis pelaksanaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjaga citra positif anggota dewan Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat.

4. Untuk mengetahui evaluasi strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menjaga citra positif anggota dewan Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini membawa manfaat dan nilai guna yang besar, tidak hanya bagi peneliti sendiri tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang akan memanfaatkannya. Penelitian tersebut diharapkan mampu menyumbang pemahaman serta pengembangan tugas Humas DPRD Provinsi Jawa Barat, terutama dalam upaya mempertahankan dan membentuk citra positif bagi anggota dewan fraksi lewat berbagai strategi komunikasi publik. Lewat penelitian ini, diharapkan timbul pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana Humas menjalankan fungsi komunikasi, mengelola informasi, dan memperkuat citra lembaga. Sesuai dengan uraian tersebut, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut::

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu komunikasi, khususnya di ranah komunikasi politik dan hubungan masyarakat (public relations), melalui pemaparan penerapan strategi komunikasi pada lembaga legislatif tingkat daerah..

2. Secara Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dokumen kepustakaan yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

3. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Humas Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Bagi lembaga legislatif lainnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan strategi komunikasi politik yang berorientasi pada peningkatan citra publik. Dan bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana proses komunikasi politik dijalankan oleh wakil rakyat di tingkat daerah dan bagaimana citra lembaga legislatif dibentuk melalui strategi komunikasi yang terencana.